

BERSAMA LAWAN KORUPSI



Potensi Teologi Digital dalam Upaya Anti-Korupsi

Penulis : Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Sambutan Pengantar Penulis

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kekuatan, inspirasi, dan kesempatan untuk menyusun buku ini: ***Potensi Teologi Digital dalam Upaya Anti-Korupsi***. Buku ini lahir dari pergulatan intelektual dan spiritual dalam memahami dua realitas besar zaman ini: maraknya korupsi dan menjamurnya kehidupan digital.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, ironis rasanya bahwa korupsi justru tumbuh subur di berbagai sektor. Saya meyakini, bahwa perlawanan terhadap korupsi tidak cukup hanya dengan perangkat hukum dan politik—tetapi juga membutuhkan pendekatan moral, spiritual, dan kultural. Di sinilah *teologi digital* hadir bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tetapi sebagai sarana pembaharuan nilai di tengah masyarakat digital.

Buku ini mencoba menjawab pertanyaan sederhana namun penting: **bisakah iman dan teknologi bekerja sama melawan budaya korupsi?** Saya percaya jawabannya adalah: bisa, jika kita mau mengaktualkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan pelayanan ke dalam ekosistem digital yang kita gunakan setiap hari.

Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai karya final, melainkan sebagai undangan terbuka bagi para teolog, aktivis anti-korupsi, pemuka agama, pendidik, dan kaum muda digital untuk berdialog, berkolaborasi, dan menciptakan ruang-ruang baru yang kudus—bahkan di dalam layar ponsel dan media sosial.

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung lahirnya buku ini, termasuk para akademisi, mitra dialog, serta komunitas yang terus mendorong integrasi iman dan teknologi untuk kemaslahatan bersama. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam gerakan besar menuju Indonesia yang lebih jujur, adil, dan bermartabat.

Salam hormat dan penuh harapan,

Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Penulis

2025

DAFTAR ISI

I. Kata Pengantar

- Latar belakang penulisan buku
- Urgensi tema anti-korupsi dari perspektif teologi digital
- Tujuan dan kontribusi ilmiah buku
- Terima kasih dan pihak yang terlibat

II. Pendahuluan

- Deskripsi masalah: Korupsi sebagai budaya di Indonesia
- Keterbatasan pendekatan hukum dan politik
- Munculnya pendekatan baru: *Teologi Digital*
- Pertanyaan penelitian dan tujuan buku
- Metodologi: studi literatur, pendekatan interdisipliner, dan analisis kasus

III. Korupsi di Indonesia: Masalah Struktural dan Kultural

- Sejarah korupsi dari zaman VOC hingga reformasi
- Aspek budaya, sosial, politik, dan ekonomi korupsi
- Pandangan para ahli (Anderson, Nasaruddin Umar, Gus Sholah, Burhanuddin Muhtadi, dll.)
- Dampak sistemik dan generatif terhadap masyarakat

IV. Teologi Digital: Definisi, Ruang Lingkup, dan Relevansi Sosial

- Apa itu Teologi Digital (digital theology/cybertheology)
- Dimensi pedagogis, liturgis, kontemplatif, dan etis
- Peran budaya digital dan transisi ke masyarakat post-digital
- Etika keagamaan di ruang digital: disinformasi, otentisitas, dan kehadiran spiritual
- Tinjauan pustaka mutakhir (2020–2025):
 - **Campbell, H. (2021)** – *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*
 - **Pauline Cheong et al. (2020)** – *Religion and Digital Media: Narratives, Authority and Power*

V. Ajaran Agama-agama di Indonesia dan Sikap Terhadap Korupsi

- Perspektif Islam: *fasad, ghulul, risywah*
- Perspektif Kristen: keadilan, kasih, integritas, anti cinta uang
- Perspektif Hindu: *dharma, karma phala, Tri Kaya Parisudha*
- Perspektif Buddha: *sila, micca ajiva, lobha*
- Tabel perbandingan teologis dan etis lintas agama
- Kesamaan nilai-nilai moral dan relevansi untuk gerakan kolektif anti-korupsi

VI. Teologi Digital sebagai Alat Transformasi Budaya Anti-Korupsi

- Platform digital sebagai ruang pewartaan moralitas
- Pendidikan agama melalui konten digital: e-learning, khotbah daring, podcast, Instagram, TikTok
- Literasi moral berbasis iman di kalangan generasi digital (Gen Z dan Alpha)
- Kasus-kasus penggunaan teknologi digital oleh tokoh dan lembaga agama
 - KPK-Kemenag
 - Dai anti-korupsi digital
 - Gereja digital dan live-stream khotbah etis
- Konsep “Injil Digital vs. Korupsi Digital”

VII. Studi Kasus Inisiatif Anti-Korupsi Digital Berbasis Agama

- Studi kasus dari Indonesia:
 - Program SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi)
 - Pendidikan anti-korupsi di madrasah
 - Khotbah daring tokoh agama Kristen & Islam
 - Buku anti-korupsi berbasis nilai agama dalam format digital
- Evaluasi awal efektivitas: kekuatan & keterbatasan
- Model sinergi antara agama, teknologi, dan masyarakat sipil

VIII. Tantangan dan Keterbatasan Teologi Digital dalam Aksi Etis

- Literasi digital yang tidak merata
- Risiko disinformasi dan manipulasi moralitas digital
- Kesenjangan digital dan akses teknologi
- Reifikasi nilai agama dalam algoritma media sosial
- Butuh integrasi antara strategi digital dan keterlibatan komunitas langsung

IX. Gagasan Strategis dan Rekomendasi Inovatif

A. Untuk Lembaga Keagamaan

- Peta jalan transformasi digital moralitas
- Pelatihan digital literacy untuk pendeta, ustaz, dan pemuka agama
- Modul anti-korupsi berbasis iman yang kontekstual dan viral

B. Untuk Pemerintah dan KPK

- Sinergi sistematis antar kementerian dan tokoh agama
- Kolaborasi dalam produksi konten digital etis
- Platform whistleblower berbasis keagamaan (dengan perlindungan spiritual)

C. Untuk Akademisi dan Civil Society

- Riset kolaboratif lintas disiplin (teologi, TI, pendidikan moral)
- Komunitas daring untuk advokasi moral dan transparansi sosial
- Desain kurikulum digital etik berbasis teologi lintas agama

X. Penutup

- Reiterasi novelty: *Teologi Digital sebagai pendekatan moral-teologis dalam dunia digital*
 - Potensi jangka panjang untuk transformasi budaya Indonesia
 - Urgensi kolaborasi antar aktor iman dan teknologi
-

Potensi Teologi Digital dalam Upaya Anti-Korupsi

Oleh Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Bab 1

Pendahuluan

Mempersiapkan Pangung untuk Teologi Digital dalam Anti-Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan yang merajalela di Indonesia, mengancam fondasi masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan perekonomian negara. Fenomena ini bukan lagi sekadar tindakan individual, melainkan telah mengakar dan menjadi bagian dari budaya di berbagai lapisan masyarakat.¹ Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang besar bagi keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan bangsa.³ Sejarah mencatat bahwa praktik korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum masa kemerdekaan, dan terus berevolusi seiring dengan perubahan zaman.² Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif, melampaui upaya penegakan hukum semata.

Dalam konteks ini, Teologi Digital, sebagai bidang studi yang mengeksplorasi hubungan antara teologi dan teknologi digital⁶, menawarkan perspektif yang menarik dan relatif baru untuk memahami dan memerangi budaya korupsi. Teologi Digital mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam praktik keagamaan, pemahaman teologis, dan penyebaran informasi keagamaan.⁷ Dengan semakin mendalamnya penetrasi teknologi digital dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam ranah keagamaan, Teologi Digital memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan etika yang dapat melawan budaya korupsi. Pendekatan ini dapat memanfaatkan jangkauan luas dan daya tarik platform digital untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama yang mengutuk korupsi dan mempromosikan perilaku jujur dan bertanggung jawab.

Penulis dalam artikel ini bertujuan mengeksplorasi potensi Teologi Digital dalam memahami dan memerangi budaya korupsi di Indonesia. Melalui tinjauan literatur yang mendalam dan analisis pendapat para ahli, artikel ini akan mengkaji akar permasalahan korupsi di Indonesia dari perspektif budaya, mendefinisikan dan memahami konsep Teologi Digital, menganalisis perspektif agama-agama di Indonesia terhadap korupsi, dan pada akhirnya, menyelidiki bagaimana prinsip dan alat Teologi Digital dapat dimanfaatkan secara strategis dalam upaya pemberantasan

korupsi.

Pendekatan yang relatif baru ini diharapkan dapat memberikan wawasan segar dan strategi inovatif dalam menghadapi tantangan korupsi yang telah lama mengakar di Indonesia.

1.1. Latar Belakang dan Pernyataan Masalah: Tantangan Korupsi yang Berkelanjutan dan Lanskap Teologi yang Berkembang di Era Digital

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan telah menjadi tantangan global yang persisten, menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan etika yang merugikan di berbagai belahan dunia. Biaya ekonomi dan sosial dari korupsi sangat besar, menghambat pembangunan, mengikis kepercayaan publik, dan merusak tata kelola yang baik. Meskipun langkah-langkah anti-korupsi tradisional, seperti kerangka hukum dan reformasi kelembagaan, sangat penting, seringkali langkah-langkah tersebut menghadapi keterbatasan dalam mengatasi akar penyebab masalah moral dan bentuk-bentuk aktivitas terlarang yang terus berkembang, terutama di ranah digital. Keterbatasan pendekatan yang semata-mata bersifat legal atau institusional di era digital menjadi semakin nyata. Munculnya platform digital memperkenalkan jalur baru bagi korupsi, seperti penipuan siber, manipulasi data, atau kampanye disinformasi untuk keuntungan ilegal, yang mungkin tidak sepenuhnya diantisipasi atau dilawan secara efektif oleh kerangka hukum tradisional. Ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum diperlukan, kerangka tersebut tidak cukup. Kerangka etika yang lebih dalam dan intrinsik diperlukan untuk mengatasi dimensi moral korupsi, terutama ketika anonimitas atau jarak digital dapat mengurangi akuntabilitas yang dirasakan.

Secara bersamaan, masyarakat global telah mengalami transformasi digital yang mendalam, mengubah cara manusia berinteraksi, menyebarkan informasi, dan membentuk struktur sosial. Dalam konteks ini, teologi dan praktik keagamaan juga beradaptasi dan terlibat dengan lanskap digital ini, memunculkan bidang studi yang dikenal sebagai "teologi digital". Teologi digital mengeksplorasi persimpangan antara pemikiran teologis dan budaya digital, termasuk penggunaan platform digital untuk wacana keagamaan, pembangunan komunitas, dan refleksi etika. Etika digital, yang diinformasikan oleh prinsip-prinsip teologis, dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi tantangan moral di dunia maya. Peran nilai-nilai moral dan etika sangat mendasar dalam memerangi korupsi, memberikan jembatan alami untuk kontribusi teologis.

Teologi digital, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teologis dengan etika digital, menawarkan jalur untuk menumbuhkan kompas moral intrinsik dalam lingkup digital, bergerak melampaui kepatuhan semata menuju integritas sejati. Jika korupsi pada dasarnya adalah kegagalan moral, maka pendekatan yang menumbuhkan nilai-nilai moral intrinsik cenderung lebih berkelanjutan daripada yang hanya mengandalkan penegakan eksternal. Teologi digital, dengan memanfaatkan kerangka keagamaan yang sudah ada dan otoritas moralnya, berpotensi

menanamkan rasa tanggung jawab etika dan integritas yang lebih dalam pada individu yang beroperasi di ruang digital. Hal ini mendorong sikap proaktif, bukan reaktif, terhadap korupsi, bergerak melampaui sekadar mendeteksi korupsi menuju pencegahan melalui pembentukan karakter.

1.2. Proposisi Kebaruan: Mengapa dan Bagaimana Teologi Digital Menawarkan Lensa atau Alat Unik untuk Upaya Anti-Korupsi

Meskipun teologi secara historis telah menginformasikan etika dan tata kelola, penerapan spesifiknya di ranah digital untuk anti-korupsi merupakan area yang belum banyak dieksplorasi. Di sinilah letak kebaruan buku ini. Korupsi modern seringkali memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti algoritma keuangan yang kompleks, komunikasi terenkripsi, atau *deepfake* untuk disinformasi. Kerangka etika tradisional mungkin kesulitan untuk mengikuti tantangan digital yang berkembang pesat ini. Etika digital, ketika diinformasikan oleh prinsip-prinsip teologis, dapat memberikan lensa etika yang lebih adaptif dan mendalam. Ini berarti teologi digital tidak hanya tentang menerapkan etika lama pada teknologi baru, tetapi tentang mengembangkan pemahaman etika baru yang secara khusus disesuaikan untuk lingkungan digital. Dengan demikian, teologi digital dapat mengatasi kesenjangan kritis dalam strategi anti-korupsi saat ini yang seringkali lebih berfokus pada solusi teknis atau hukum daripada dimensi moral perilaku digital yang mendasarinya.

Kontribusi unik teologi digital terletak pada kemampuannya untuk menawarkan:

- Kerangka etika yang kuat yang diadaptasi untuk tantangan digital, dengan menarik prinsip-prinsip teologis abadi.
- Metodologi baru untuk pendidikan moral dan pembangunan komunitas di ruang daring.
- Fokus pada nilai-nilai intrinsik dan pembentukan karakter, melengkapi mekanisme penegakan eksternal.
- Potensi untuk memanfaatkan platform digital untuk inisiatif transparansi dan akuntabilitas.

Munculnya platform digital untuk wacana keagamaan dan pembangunan komunitas menunjukkan jangkauan yang luas, mudah diakses, dan seringkali global untuk konten teologis dan keterlibatan komunitas. Jika teologi digital dapat secara efektif menerjemahkan etika anti-korupsi ke dalam format digital (misalnya, kursus daring, modul interaktif, kampanye media sosial), hal ini dapat secara signifikan meningkatkan upaya pendidikan moral jauh melampaui inisiatif tradisional dan terlokalisasi. Ini memberikan implikasi yang lebih luas untuk upaya anti-korupsi, menunjukkan potensi untuk sensitivasi etika dan mobilisasi komunitas yang meluas yang sebelumnya sulit dicapai.

1.3. Ruang Lingkup dan Tujuan Buku

Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan konseptual antara teologi digital dan upaya anti-korupsi, mengidentifikasi aplikasi praktis, menganalisis tantangan yang mungkin timbul, dan mengajukan arah penelitian di masa depan. Buku ini akan berfokus pada potensi teologi digital sebagai pelengkap dan penguat strategi anti-korupsi yang ada, bukan sebagai pengganti.

1.4. Tabel Penting: Persimpangan Konseptual Utama antara Teologi Digital dan Anti-Korupsi

Tabel berikut secara visual mengartikulasikan kebaruan inti buku ini, menunjukkan titik-titik persimpangan spesifik dan potensi sinergi antara dua bidang yang tampaknya berbeda ini. Tabel ini berfungsi sebagai peta konseptual fundamental bagi pembaca. Ini adalah alat yang sangat berharga karena secara langsung menjawab persyaratan "kebaruan" dari pertanyaan pengguna. Ini memberikan gambaran yang ringkas dan tingkat tinggi tentang argumen sentral buku ini, membuat koneksi interdisipliner yang kompleks menjadi eksplisit dan mudah dipahami. Untuk sebuah buku ilmiah, kerangka konseptual seperti itu di awal sangat penting untuk memandu pembaca melalui argumen-argumen rinci selanjutnya dan menunjukkan kontribusi unik dari penelitian ini. Ini bertindak sebagai "pernyataan tesis" dalam bentuk tabel, memungkinkan pemahaman cepat tentang proposisi inti buku dan nilai jual uniknya.

Tabel 1.1: Sinergi Konseptual: Kontribusi Teologi Digital terhadap Anti-Korupsi

Konsep/Prinsip Teologi Digital	Aspek Anti-Korupsi yang Relevan	Titik/Mekanisme Sinergi	Potensi Dampak pada Anti-Korupsi
Etika Digital	Transparansi, Akuntabilitas, Perilaku Etis	Membangun kerangka moral untuk interaksi digital yang bertanggung jawab.	Mendorong integritas intrinsik, meningkatkan kepercayaan digital.
Komunitas Kebajikan Daring	Pendidikan Moral, Whistleblowing, Data	Membentuk jaringan dukungan etis dan pengawasan kolektif	Mempromosikan tata kelola data yang etis, memberdayakan

	Integritas	di ruang digital.	warga digital.
Akuntabilitas Ilahi dalam Ruang Digital	Akuntabilitas, Pencegahan Korupsi	Menanamkan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi di luar penegakan hukum.	Mengurangi perilaku koruptif melalui internalisasi nilai.
Pelayanan Digital	Tata Kelola Data, Penggunaan Sumber Daya	Mendorong pengelolaan sumber daya digital yang adil dan bertanggung jawab.	Memastikan penggunaan teknologi yang etis dan adil dalam tata kelola.
Informasi sebagai Sumber Daya Moral	Transparansi, Keterbukaan Data	Menekankan nilai kebenaran dan integritas informasi sebagai kebaikan bersama.	Melawan disinformasi dan manipulasi data untuk tujuan korupsi.

Bab 2

Fondasi Teologi Digital

Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, jauh sebelum era digital. Jejak praktik korupsi dapat ditelusuri hingga zaman Hindia Belanda, melewati masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.² Bahkan, menurut Benedict Anderson, budaya korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah, dimulai sejak zaman VOC.² Pola perkembangan korupsi ini telah menjadi salah satu akar budaya Indonesia sejak masa lalu.⁴ Pengaruh VOC tidak hanya memperkenalkan budaya Barat tetapi juga memperluas praktik korupsi di Indonesia, yang dampaknya masih terasa hingga kini.⁵

Munculnya budaya korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dari sudut pandang sosial, korupsi telah menjadi kebiasaan sejak dahulu dan bahkan dianggap sebagai hal yang wajar dalam sistem sosial yang berlaku.² Masyarakat memandang korupsi sebagai sesuatu yang telah terjadi sejak dahulu dan terwariskan, sehingga menjadi semacam tradisi dalam birokrasi patrimonial.² Dalam berbagai perbincangan, kata "korupsi" sudah tidak lagi dianggap aneh dan seolah telah menjadi bahasa lumrah.² Perilaku korupsi telah meluas di berbagai tingkatan masyarakat, termasuk antara pengusaha dan pejabat birokrat, serta antara warga dengan status ekonomi menengah ke bawah.² Sikap permisif masyarakat terhadap praktik korupsi, bahkan menganggapnya sebagai "pelumas" bagi proses ekonomi dan politik, semakin memperkuat budaya ini.²

Faktor politik juga memainkan peran signifikan dalam melanggengkan budaya korupsi. Terjadinya penyimpangan kepentingan pada lembaga politik, di mana proses legislasi berlangsung, menjadi salah satu dampak politik dari korupsi.² Proses pemilihan umum yang tidak sepenuhnya jujur dan adil, serta maraknya praktik politik uang dalam berbagai pemilihan kepala daerah, turut berkontribusi pada hal ini.² Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga politik seringkali kehilangan moralitas dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.² Kepentingan partai politik yang kuat juga mendorong tindakan korupsi dalam birokrasi dan masyarakat.²

Dari perspektif ekonomi, korupsi menimbulkan berbagai dampak negatif yang berkontribusi pada keberlangsungannya. Korupsi menyebabkan inefisiensi yang mengakibatkan tingginya harga, eksploitasi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, serta birokrasi yang tidak efektif dan efisien karena lebih mementingkan keuntungan pribadi.² Rendahnya gaji pegawai negeri sipil juga menjadi salah satu pemicu tindakan korupsi.² Korupsi juga meningkatkan ketimpangan pendapatan dan memperburuk kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pemasukan negara.²

Normalisasi budaya korupsi ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan perekonomian Indonesia. Korupsi mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³ Kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat negara menurun.⁹ Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kualitas infrastruktur publik, dan mengurangi pendapatan pajak.¹⁰ Dampak sosialnya meliputi penurunan kesejahteraan sosial, penderitaan masyarakat luas akibat perilaku koruptor, dan terhambatnya investasi pada sumber daya manusia.² Korupsi juga merusak moralitas bangsa dan dapat menjadi malapetaka bagi generasi penerus jika dianggap sebagai hal yang biasa.¹

Para ahli juga menyoroti bahaya dan pervasifnya korupsi di Indonesia. Mansyur Semma menggambarkan korupsi sebagai "epidemi".² Prof. Nasaruddin Umar melalui bukunya "Teologi Korupsi" menekankan pentingnya memahami masalah ketidakjujuran yang terus melanda negara.¹¹ Gus Sholah bahkan menyatakan bahwa "korupsi sudah menjadi budaya orang Indonesia".¹² Prof. Ariel Heryanto dan Dr. Burhanuddin Muhtadi menyoroti akar budaya korupsi dalam warisan feodalisme dan sistem politik yang transaksional.¹³ Perspektif para ahli ini menegaskan bahwa korupsi di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan mengakar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

2.1. Mendefinisikan Teologi Digital: Evolusi, Konsep Kunci, dan Wacana Kontemporer

Teologi digital sebagai bidang studi telah muncul dari refleksi awal tentang teknologi dan agama, hingga formalisasinya sebagai disiplin yang berbeda. Ini melampaui sekadar penggunaan alat digital untuk tujuan keagamaan, melainkan melibatkan teologisasi tentang digital itu sendiri. Banyak lembaga keagamaan pada awalnya menggunakan alat digital hanya sebagai media baru untuk praktik yang sudah ada (misalnya, streaming khotbah). Namun, pemahaman yang lebih dalam tentang teologi digital, seperti yang tersirat oleh kebutuhan untuk menginformasikan "etika digital", menunjukkan keterlibatan yang lebih mendalam. Ini adalah pergeseran dari sekadar menggunakan alat digital (teologi *dalam* digital) menjadi menguji secara kritis sifat keberadaan digital, dampaknya pada identitas manusia, komunitas, dan agen moral dari perspektif teologis (teologi *tentang* digital). Keterlibatan yang lebih dalam inilah yang memungkinkan pengembangan kerangka etika yang kuat yang relevan dengan anti-korupsi, karena ini membahas akar penyebab pelanggaran digital daripada hanya gejalanya.

Konsep-konsep inti dalam teologi digital meliputi "eklesiologi digital," "liturgi digital," dan "evangelisme digital," namun yang paling krusial adalah "etika digital" dan "antropologi digital" (bagaimana keberadaan digital memengaruhi sifat manusia dari perspektif teologis). Etika digital, yang diinformasikan oleh prinsip-prinsip teologis, dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi tantangan moral di dunia maya. Dalam dunia yang mengglobal, sekuler, namun

masih beragam agama, kerangka etika sekuler murni untuk perilaku digital terkadang kurang memiliki resonansi atau daya tarik universal. Teologi digital, dengan menarik nilai-nilai keagamaan yang mengakar kuat (misalnya, kebenaran, keadilan, pelayanan, tanggung jawab komunitas), dapat memberikan bahasa moral yang akrab dan menarik bagi sebagian besar populasi global. Ini menyiratkan bahwa teologi digital dapat menumbuhkan integritas tidak hanya melalui argumen rasional tetapi melalui daya tarik terhadap otoritas moral yang lebih tinggi atau keyakinan spiritual, yang berpotensi mengarah pada perubahan perilaku yang lebih mendalam dan meluas dalam upaya anti-korupsi. Wacana kontemporer dalam bidang ini juga menyentuh tantangan seperti isu otentisitas, komunitas, dan representasi di ruang keagamaan digital. Munculnya platform digital untuk wacana keagamaan dan pembangunan komunitas menunjukkan manifestasi praktis dari teologi digital, menunjukkan bagaimana wacana keagamaan sudah ada secara daring, memberikan dasar untuk memanfaatkan platform ini untuk tujuan etika.

2.2. Prinsip Teologis yang Relevan dengan Etika dan Integritas dalam Konteks Digital

Konsep-konsep teologis universal seperti kebenaran, keadilan, pelayanan, akuntabilitas, kasih sayang, dan komunitas (misalnya, *ummah*, *sangha*, *koinonia*) memiliki relevansi yang mendalam dengan etika dan integritas. Prinsip-prinsip teologis ini dapat menginformasikan etika digital. Peran nilai-nilai moral dan etika sangat mendasar dalam memerangi korupsi. Sementara prinsip-prinsip teologis tradisional bersifat abadi, penerapannya dalam konteks digital menjadi sangat kompleks dan diperkuat. Misalnya, "kebenaran" di era *deepfake* dan bias algoritmik menghadirkan tantangan jauh melampaui penipuan tradisional. "Akuntabilitas" menjadi lebih sulit ditegakkan dengan anonimitas dan transaksi digital lintas batas. Ini menyiratkan bahwa teologi digital tidak hanya harus mengartikulasikan kembali prinsip-prinsip ini tetapi juga mengembangkan kerangka interpretatif baru yang membahas skala, kecepatan, dan anonimitas yang melekat dalam interaksi digital. Potensi korupsi diperbesar dalam lingkungan ini, membuat kebutuhan akan etika digital yang kuat dan informasi teologis menjadi lebih kritis.

Jika prinsip-prinsip teologis diterjemahkan secara efektif ke dalam konteks digital, prinsip-prinsip tersebut dapat membantu individu menginternalisasi norma-norma etika untuk perilaku daring mereka. Ini bergerak melampaui aturan eksternal atau ketakutan akan hukuman menuju "hati nurani digital" intrinsik. Hati nurani ini, yang diinformasikan oleh konsep-konsep teologis seperti kemahatahuan ilahi atau kesucian kebenaran, dapat bertindak sebagai pencegah internal yang kuat terhadap praktik digital yang korup, bahkan ketika pengawasan eksternal terbatas. Implikasi yang lebih luas adalah pergeseran dari model yang didorong oleh kepatuhan ke model yang didorong oleh nilai untuk anti-korupsi di ranah digital.

2.3. Platform Digital dan Perannya dalam Wacana Keagamaan dan Pembangunan Komunitas

Platform digital, seperti media sosial, forum, aplikasi khusus, dan ruang realitas virtual, telah banyak digunakan oleh komunitas keagamaan. Platform ini memfasilitasi bentuk-bentuk baru ibadah, pendidikan, penjangkauan, dan keterlibatan komunitas. Namun, platform ini juga menghadirkan tantangan seperti misinformasi, *echo chamber*, dan kesenjangan digital, di samping peluang untuk jangkauan yang lebih luas, dialog antaragama, dan penyebaran informasi yang cepat.

Platform digital memiliki sifat ganda: alat untuk kebaikan dan keburukan dalam anti-korupsi. Platform digital, yang disorot untuk wacana keagamaan dan komunitas, juga dapat dieksploitasi untuk tujuan korup, seperti menyebarkan disinformasi untuk keuntungan politik, memfasilitasi transaksi ilegal, atau menciptakan *echo chamber* yang menormalisasi perilaku tidak etis. Ini berarti bahwa keterlibatan teologi digital dengan platform ini harus secara kritis menyadari potensi ganda mereka. Tidak cukup hanya menggunakannya; teologi digital harus secara aktif bekerja untuk melawan penyalahgunaan mereka dengan mempromosikan kewarganegaraan digital yang etis dan integritas di dalam ruang-ruang ini. Hubungan kausal di sini adalah bahwa adopsi platform digital yang meluas memerlukan keterlibatan teologis yang proaktif untuk mengurangi potensi mereka dalam memfasilitasi korupsi.

Jika komunitas keagamaan terbentuk secara daring, dan jika teologi menginformasikan etika digital, maka komunitas daring ini mewakili sumber daya yang signifikan dan sebagian besar belum dimanfaatkan untuk menumbuhkan integritas kolektif. Mereka dapat berfungsi sebagai "jaringan integritas" informal, di mana anggota saling bertanggung jawab, berbagi dilema etika, dan memperkuat nilai-nilai anti-korupsi dalam interaksi digital mereka. Implikasi yang lebih luas adalah pendekatan anti-korupsi berbasis komunitas yang memanfaatkan struktur sosial yang ada di ranah digital, yang berpotensi membuat upaya anti-korupsi lebih organik dan berkelanjutan dalam kelompok daring tertentu.

Bab 3

Memahami Anti-Korupsi: Kerangka Kerja dan Tantangan

Teologi Digital, atau juga dikenal sebagai *cybertheology*, didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara teologi dan teknologi digital.⁶ Dalam diskursus yang lebih luas, Teologi Digital mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan teknologi digital sebagai alat pedagogis untuk mengajarkan teologi, hingga pemanfaatan teknologi untuk penelitian teologis yang inovatif.⁶ Selain itu, bidang ini juga melibatkan refleksi teologis yang mendalam tentang digitalitas dan budaya digital itu sendiri, serta penilaian kembali dan kritik terhadap digitalitas berdasarkan prinsip-prinsip etika teologis.⁶ Beberapa sarjana bahkan mengusulkan aspek kelima dari Teologi Digital, yang menekankan penggunaan teknologi digital yang lebih terintegrasi namun tetap kritis dalam studi teologi serta kepercayaan dan praktik keagamaan.⁶ Dalam konteks Katolik, istilah *cybertheology* seringkali lebih dominan digunakan.⁶

Hubungan antara Teologi Digital dan budaya digital sangat erat. Budaya digital merupakan realitas baru yang memengaruhi eksistensi manusia di abad ke-21, dan teknologi digital menentukan cara manusia hadir dan berinteraksi.¹⁴ Kehadiran yang dulunya diinterpretasikan melalui kepribadian, kini tergerus oleh sistem digital yang artifisial.¹⁴ Hal ini menimbulkan krisis makna kehadiran yang perlu direspon secara kritis oleh teologi.¹⁴ Teologi Digital berusaha untuk memahami dan merefleksikan hubungan antara iman, khususnya iman Kristen, dan teknologi digital.¹⁵ Bidang ini mengeksplorasi bagaimana teknologi digital memengaruhi pemahaman tentang Tuhan, manusia, Gereja, dan praktik iman, serta menganalisis dampaknya terhadap pengalaman religius, komunitas iman, dan pemahaman teologis.¹⁵ Media sosial, sebagai bagian integral dari budaya digital, telah menjadi ruang kontemporer yang memungkinkan setiap orang untuk menembus batasan ruang dan sosial.¹⁶ Teologi Digital juga berupaya untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan penuh kebajikan dan kearifan.¹⁶ Gereja juga didorong untuk "berinkarnasi secara digital" dan melaksanakan tugas-tugasnya (marturia, koinonia, diakonia) di ruang digital.¹⁷ Pergeseran ke layanan keagamaan daring selama pandemi semakin menekankan perlunya Teologi Digital untuk merumuskan pemahaman yang lebih kontekstual tentang "tanda kehadiran Allah" dalam era digital.¹⁸

Perkembangan teknologi digital dan Teologi Digital juga memunculkan berbagai pertimbangan dan tantangan etis. Etika digital dalam konteks keagamaan membahas isu-isu penting seperti privasi, disinformasi, dan interaksi daring yang bertanggung jawab dalam komunitas iman.⁷ Dunia digital seringkali menyajikan konten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama, yang menjadi tantangan signifikan bagi pendidikan agama.¹⁹ Penggunaan media sosial, konten digital, dan interaksi virtual memengaruhi pola pikir dan perilaku moral, termasuk risiko terpapar konten dewasa, kekerasan, dan intoleransi.¹⁹ Batasan antara realitas dan

pengalaman virtual menjadi kabur, yang dapat mempersulit pengembangan pemikiran kritis dan penalaran etis.¹⁹ Teologi memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan moral digital ini, termasuk meneguhkan dasar epistemologis dan etis, mengkritisi perkembangan ilmu pengetahuan yang teknosentris, memberikan perspektif transendental, menyaring informasi teologis, mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, dan menjaga dimensi personalitas dan komunitas.²⁰

3.1. Mendefinisikan Korupsi: Tipologi, Penyebab, dan Dampak

Korupsi adalah fenomena yang kompleks, sering didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Berbagai bentuk korupsi meliputi korupsi besar, kecil, sistemik, politik, birokrasi, dan korporat, yang bermanifestasi baik dalam konteks tradisional maupun digital (misalnya, penipuan siber, manipulasi data, transaksi daring ilegal). Korupsi di era digital terus berkembang, memerlukan strategi anti-korupsi yang adaptif. Sementara bentuk-bentuk tradisional tetap ada, era digital memperkenalkan tipologi baru, seperti pencucian uang kripto, bias algoritmik untuk keuntungan ilegal, atau manipulasi data untuk penipuan pemilu. Ini menyiratkan bahwa upaya anti-korupsi tidak dapat tetap statis; upaya tersebut harus berkembang untuk memahami dan memerangi manifestasi digital baru ini. Jika teologi digital dapat menginformasikan etika digital, hal itu dapat berkontribusi pada pemahaman dimensi moral dari praktik korupsi digital baru ini, yang seringkali mengeksploitasi celah teknologi daripada hanya celah hukum. Hubungan kausal di sini adalah bahwa digitalisasi masyarakat menciptakan bentuk-bentuk korupsi baru, sehingga memerlukan kerangka etika khusus digital untuk anti-korupsi.

Penyebab korupsi meliputi institusi yang lemah, kurangnya transparansi, standar etika yang rendah, kemiskinan, dan norma budaya. Dampak korupsi sangat menghancurkan, merusak pembangunan ekonomi, kesetaraan sosial, kepercayaan publik, dan tata kelola. Korupsi dapat dipandang sebagai gejala dari defisit etika atau moral yang lebih dalam, bukan hanya kegagalan institusional. Meskipun institusi yang lemah dan celah hukum sering disebut sebagai penyebab, persistensi korupsi bahkan dengan undang-undang yang kuat menunjukkan masalah yang lebih dalam: defisit dalam integritas moral individu dan kolektif. Peran nilai-nilai moral dan etika dalam memerangi korupsi sangat penting. Ini menyiratkan bahwa upaya anti-korupsi harus bergerak melampaui kepatuhan semata untuk mengatasi kerangka etika yang mendasari yang memandu perilaku individu dan kolektif. Teologi digital, dengan melibatkan nilai-nilai intrinsik, dapat menawarkan jalur untuk mengatasi defisit moral yang lebih dalam ini, menumbuhkan budaya integritas yang kurang bergantung pada penegakan eksternal.

3.2. Strategi Anti-Korupsi Saat Ini: Pendekatan Hukum, Kelembagaan, Pendidikan, dan Etika

Strategi anti-korupsi saat ini mencakup kerangka hukum (misalnya, undang-undang anti-korupsi nasional dan internasional, konvensi seperti UNCAC), reformasi kelembagaan (peran lembaga anti-korupsi independen, peradilan, reformasi administrasi publik, dan perlindungan pelapor), kampanye pendidikan dan kesadaran, serta pendekatan etika dan berbasis nilai (kode etik, tanggung jawab sosial perusahaan, promosi integritas). Namun, langkah-langkah anti-korupsi tradisional ini seringkali memiliki keterbatasan, terutama dalam beradaptasi dengan lanskap digital.

Ada "kesenjangan digital" dalam strategi anti-korupsi tradisional. Banyak strategi yang ada (hukum, kelembagaan) dikembangkan untuk era pra-digital atau awal digital. Mereka mungkin kesulitan untuk secara efektif mengatasi bentuk-bentuk korupsi baru yang difasilitasi oleh teknologi digital canggih (misalnya, *blockchain* untuk keuangan ilegal, AI untuk memanipulasi opini publik, transaksi *dark web*). Ini menunjukkan kesenjangan digital yang signifikan dalam upaya anti-korupsi saat ini. Teologi digital, dengan fokusnya pada etika digital, dapat membantu mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan kompas moral yang secara khusus dirancang untuk kompleksitas dan ambiguitas ranah digital, sehingga meningkatkan efektivitas upaya anti-korupsi secara keseluruhan.

Selain itu, terdapat kebutuhan akan pendekatan "seluruh masyarakat" untuk anti-korupsi yang mencakup aktor berbasis agama. Anti-korupsi tradisional seringkali berfokus pada aktor negara, LSM, dan masyarakat sipil. Namun, keterbatasan langkah-langkah tradisional menyiratkan bahwa ini saja tidak sepenuhnya cukup. Peran nilai-nilai moral, yang seringkali berakar dalam tradisi keagamaan, sangat penting. Ini menunjukkan bahwa organisasi berbasis agama dan kerangka teologis, termasuk teologi digital, mewakili kekuatan masyarakat yang signifikan, seringkali kurang dimanfaatkan, untuk mempromosikan integritas. Mengintegrasikan teologi digital ke dalam strategi anti-korupsi akan memperluas pendekatan "seluruh masyarakat", memanfaatkan otoritas moral dan jangkauan komunitas lembaga keagamaan di ranah digital untuk menumbuhkan budaya integritas yang lebih meluas.

3.3. Peran Nilai dan Moralitas dalam Memerangi Korupsi

Korupsi pada dasarnya adalah masalah etika, melibatkan pelanggaran kepercayaan dan prinsip moral. Oleh karena itu, upaya anti-korupsi yang efektif memerlukan pergeseran dari sekadar kepatuhan (menghindari hukuman) ke integritas sejati (bertindak etis bahkan ketika tidak diawasi).

Peran nilai-nilai moral dan etika sangat mendasar dalam memerangi korupsi.

Pertempuran melawan korupsi sistemik bisa menjadi proses yang panjang dan sulit, yang menyebabkan sinisme publik dan "kelelahan moral" jika upaya-upaya tersebut dirasakan tidak efektif atau semata-mata bersifat hukuman. Jika nilai-nilai moral tidak secara konsisten diperkuat dan diinternalisasi, perjuangan melawan korupsi dapat menjadi latihan birokrasi belaka. Teologi digital, dengan menawarkan sumber pembaruan spiritual dan moral, berpotensi melawan kelelahan ini dengan memberikan motivasi yang lebih dalam dan lebih tahan lama untuk integritas, yang dibingkai dalam narasi teologis yang lebih besar tentang keadilan dan kebenaran. Ini berarti bahwa teologi digital dapat berkontribusi pada keberlanjutan gerakan anti-korupsi dengan merevitalisasi komitmen moral.

Sementara peran nilai-nilai moral secara luas dinyatakan, interpretasi spesifik dan resonansi budaya dari nilai-nilai ini dapat sangat bervariasi di berbagai konteks agama dan budaya. Teologi digital, dengan mengadaptasi prinsip-prinsip teologis universal ke budaya digital yang beragam, berpotensi membuat pesan anti-korupsi lebih relevan secara budaya dan berdampak. Ini menyiratkan bahwa pendekatan etika sekuler "satu ukuran untuk semua" mungkin kurang efektif daripada pendekatan yang memanfaatkan bahasa moral yang spesifik budaya, yang secara unik dapat disediakan oleh teologi digital di ruang daring.

Bab 4

Menjembatani Kesenjangan: Potensi Teologi Digital dalam Anti-Korupsi

Agama-agama utama di Indonesia (Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha) memiliki perspektif teologis yang kuat terhadap isu korupsi, yang tercermin dalam kitab suci dan interpretasi para ulama dan cendekiawan.

Dalam Islam, korupsi (*fasad*) dilarang keras dan dianggap sebagai dosa besar.²¹ Ajaran Islam menekankan keadilan (*'adl*), kejujuran (*amanah*), dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan keuangan.²¹ Al-Quran dan Sunnah mengutuk berbagai bentuk korupsi, termasuk suap (*risywah*) dan penggelapan dana publik (*ghulul*).²¹ Jabatan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.²¹ Bahkan, dalam "Fikih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah," korupsi modern disamakan dengan *syirik modern* karena memprioritaskan uang di atas Tuhan.²¹

Dalam Kekristenan, korupsi dipandang sebagai pelanggaran moral yang menjauhkan manusia dari Tuhan dan merusak komunitas.²³ Alkitab memberikan contoh-contoh kasus korupsi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang menunjukkan bahwa praktik ini bertentangan dengan perintah Tuhan dan mendahulukan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip ilahi.²⁴ Gereja, sebagai institusi moral, memiliki peran penting dalam memerangi korupsi dan dapat berkolaborasi dengan lembaga anti-korupsi untuk tujuan ini.²⁵

Dalam Hindu, korupsi dianggap sebagai *adharma* (perbuatan tidak benar) yang membawa konsekuensi negatif sesuai dengan hukum karma.²⁶ Ajaran Hindu menekankan *Tri Kaya Parisudha* (kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan) sebagai landasan etika, yang dilanggar oleh tindakan korupsi.²⁷ Konsep *Karma Phala* (hukum sebab akibat) juga menjadi peringatan bahwa setiap tindakan, termasuk korupsi, akan membuahkan hasil yang setimpal.²⁷

Dalam Buddhisme, korupsi diidentifikasi sebagai akibat dari kondisi mental negatif seperti keserakahan dan ketidaktahuan.²⁹ Buddha mengajarkan tentang "mata pencaharian yang salah" yang mencakup tindakan penipuan dan pengambilan keuntungan yang berlebihan.²⁹ Jalan Delapan Lipat (*Ariyo Atṭhaṅgiko Maggo*) ditawarkan sebagai cara untuk mengembangkan tindakan baik dan menghindari korupsi.²⁹ Nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin juga ditekankan dalam ajaran Buddha.³⁰

Secara tradisional, ajaran-ajaran agama ini menekankan pentingnya perilaku etis, kejujuran, dan mengutuk korupsi melalui kitab suci, tradisi, dan prinsip-prinsip filosofis mereka. Semua agama

ini memberikan kerangka moral yang membimbing individu menuju perilaku yang benar dan menjauhi praktik-praktik yang merugikan orang lain dan masyarakat. Kesamaan pandangan ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun sikap moral yang bersatu melawan korupsi di Indonesia.

Tabel 1: Perspektif Agama-Agama di Indonesia tentang Korupsi

Agama	Ajaran Etika Utama yang Relevan dengan Korupsi	Kutukan Skriptural Utama terhadap Korupsi	Metode Tradisional Promosi Kejujuran dan Integritas
Islam	Keadilan (<i>'adl</i>), Kejujuran (<i>amanah</i>), Integritas	Pengkhiran Amanah (Al-Quran), Suap (Hadith), Penggelapan (Al-Quran)	Pendidikan agama, khutbah, penekanan pada akuntabilitas di hadapan Allah
Kristen	Kasih, Keadilan, Kejujuran, Integritas	Pencurian (Keluaran 20:15), Ketidakjujuran (Amsal), Cinta Uang (1 Timotius 6:10)	Pengajaran Alkitab, khotbah, teladan hidup, komunitas rohani
Hindu	<i>Tri Kaya Parisudha</i> (Kesucian Pikiran, Perkataan, Perbuatan), <i>Dharma</i> (Kebenaran), <i>Karma Phala</i> (Hukum Sebab Akibat)	Pelanggaran <i>Dharma</i> , tindakan tidak susila (<i>asusila</i>)	Pendidikan nilai dalam keluarga dan komunitas, ajaran kitab suci Veda, penekanan pada konsekuensi karma
Buddha	Jalan Delapan Lipat (<i>Ariyo Atthangiko Maggo</i>), <i>Sila</i> (Moralitas), <i>Dana</i> (Kedermawanan)	Mata Pencarian yang Salah (<i>Micca Ajiva</i>), Keserakahan (<i>Lobha</i>)	Ajaran tentang karma, meditasi, pengembangan kesadaran diri, penekanan pada nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan disiplin

4.1. Mengkonseptualisasikan Hubungan: Bagaimana Prinsip Teologis Digital Dapat Menginformasikan Etika Anti-Korupsi

Prinsip-prinsip teologis digital dapat secara signifikan menginformasikan etika anti-korupsi. Konsep teologis tentang pelayanan (sumber daya, informasi, kekuasaan) dapat diperluas ke aset digital, data, dan platform daring. Ini membingkai privasi data, keadilan algoritmik, dan pengembangan AI yang bertanggung jawab sebagai keharusan moral. Ide teologis tentang akuntabilitas ilahi dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi dan institusional yang lebih kuat dalam interaksi digital, mempromosikan transparansi dan mencegah aktivitas terlarang yang tersembunyi. Teologi digital juga dapat menumbuhkan komunitas daring yang menjunjung tinggi standar etika, menantang korupsi, dan mendukung pelapor, dengan menarik konsep *koinonia* atau *ummah* yang diadaptasi untuk ruang digital.

Jika teologi digital dapat menginformasikan etika digital dan jika nilai-nilai moral sangat penting, maka proses internalisasi nilai-nilai ini di ranah digital dapat dilihat sebagai bentuk "pembentukan spiritual digital." Ini menyiratkan bahwa upaya anti-korupsi tidak hanya harus berfokus pada pencegah eksternal tetapi juga pada penanaman kompas moral internal yang memandu perilaku digital. Teologi digital dapat menyediakan kerangka pedagogis dan komunal untuk pembentukan ini, mengarah pada individu yang secara intrinsik termotivasi untuk bertindak dengan integritas secara daring, bahkan ketika pengawasan eksternal tidak ada. Ini memiliki implikasi yang lebih luas untuk pendidikan anti-korupsi, menunjukkan pergeseran ke arah intervensi berbasis karakter di ruang digital.

Internet seringkali dianggap sebagai ruang netral atau bahkan anarkis, rentan terhadap eksploitasi. Namun, dengan menerapkan konsep teologis seperti pelayanan dan komunitas, teologi digital dapat membingkai ulang ruang digital tidak hanya sebagai utilitas teknologi tetapi sebagai "commons moral" – lingkungan bersama di mana perilaku etis adalah tanggung jawab kolektif. Ini menyiratkan hubungan kausal: dengan menanamkan ruang digital dengan makna teologis, teologi digital dapat meningkatkan taruhan moral interaksi daring, membuat praktik korupsi digital tidak hanya ilegal tetapi juga tidak bermoral dalam konteks iman tertentu. Pembingkai ulang ini dapat menumbuhkan keinginan kolektif yang lebih kuat untuk memerangi korupsi digital.

4.2. Aplikasi Praktis: Menjelajahi Alat atau Pendekatan Teologis Digital Spesifik

Aplikasi praktis teologi digital dalam anti-korupsi dapat mencakup:

- **Pendidikan Etika Digital dan Kampanye Kesadaran:** Merancang dan mengimplementasikan kursus daring, lokakarya, dan konten interaktif berdasarkan prinsip-prinsip teologis digital untuk mendidik individu tentang perilaku digital yang etis dan anti-korupsi.
- **Pembangunan Integritas Komunitas Daring:** Mengembangkan platform atau inisiatif dalam komunitas keagamaan daring yang ada untuk menumbuhkan diskusi tentang integritas, akuntabilitas, dan tindakan kolektif melawan korupsi. Ini bisa mencakup sistem akuntabilitas sejawat atau diskusi dilema etika.
- **Akuntabilitas Moral Berbasis Data dan Inisiatif Transparansi:** Menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip teologis dapat menginformasikan penggunaan etis *big data* dan AI untuk transparansi, platform pelapor, atau pemantauan potensi korupsi, sambil memastikan privasi dan keadilan.
- **Narasi Teologis untuk Penceritaan Digital:** Memanfaatkan teknik penceritaan digital untuk menyampaikan pesan anti-korupsi yang berakar pada narasi teologis, membuatnya mudah dipahami dan berdampak bagi audiens digital yang lebih luas.

Banyak platform digital memanfaatkan gamifikasi untuk melibatkan pengguna. Jika teologi digital dapat mengembangkan alat daring interaktif (misalnya, simulasi dilema etika, tantangan integritas dalam komunitas daring), hal itu berpotensi "menggamifikasi" proses penanaman integritas. Ini menyiratkan bahwa pendidikan anti-korupsi bisa menjadi lebih menarik dan tidak terlalu didaktik, menarik bagi audiens yang lebih muda dan *native digital*. Implikasi yang lebih luas adalah pendekatan yang lebih efektif dan terukur untuk pendidikan integritas, bergerak melampaui ceramah tradisional ke pengalaman belajar berbasis nilai yang interaktif.

Sementara langkah-langkah hukum dan kelembagaan mewakili "kekuatan keras," teologi digital, melalui kerangka etika dan pembangunan komunitasnya, dapat mengerahkan "kekuatan lunak" – memengaruhi perilaku melalui daya tarik dan persuasi daripada paksaan. Dengan mempromosikan integritas melalui narasi teologis yang menarik dan menumbuhkan komunitas kebajikan daring, teologi digital dapat menumbuhkan preferensi masyarakat untuk perilaku etis. Ini menyiratkan bahwa teologi digital dapat berkontribusi pada budaya anti-korupsi yang lebih berkelanjutan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dan norma-norma sosial yang mencegah korupsi, melengkapi tekanan eksternal penegakan hukum.

4.3. Studi Kasus dan Contoh yang Muncul

Mengingat sifat interdisipliner yang baru dari bidang ini, studi kasus langsung yang secara eksplisit mengintegrasikan teologi digital dan anti-korupsi mungkin masih terbatas dalam literatur yang tersedia. Namun, berdasarkan kerangka teoretis yang telah ditetapkan, beberapa skenario hipotetis dapat diuraikan untuk menunjukkan potensi aplikasi.

Misalnya, sebuah inisiatif dapat melibatkan pengembangan aplikasi seluler yang menyajikan dilema etika sehari-hari dalam konteks digital, dengan solusi yang diinformasikan oleh prinsip-prinsip teologis seperti kejujuran, pelayanan, dan akuntabilitas. Pengguna dapat berinteraksi dengan skenario ini, menerima umpan balik, dan berpartisipasi dalam diskusi komunitas daring untuk memperkuat pemahaman etika. Contoh lain adalah pembentukan "kelompok integritas digital" dalam komunitas keagamaan daring yang ada, di mana anggota secara aktif membahas tantangan korupsi di ruang digital dan mengembangkan strategi kolektif untuk mempromosikan praktik yang etis. Platform ini dapat memfasilitasi pelaporan pelanggaran etika secara anonim atau menyediakan sumber daya untuk individu yang menghadapi tekanan untuk terlibat dalam perilaku koruptif.

Jika studi kasus langsung masih langka, ini menunjukkan kesenjangan signifikan dalam bukti empiris. Meskipun argumen teoretis kuat, efektivitas teologi digital dalam anti-korupsi memerlukan demonstrasi praktis. Ini mengarah pada pertanyaan lanjutan untuk laporan akhir: jenis proyek percontohan atau desain eksperimen seperti apa yang diperlukan untuk secara empiris menguji hipotesis yang diajukan dalam buku ini? Ini menunjukkan agenda penelitian di masa depan yang berfokus pada implementasi praktis dan penilaian dampak.

Ranah digital melampaui batas geografis dan budaya. Jika teologi digital ingin efektif secara global, teologi digital tidak dapat terbatas pada satu tradisi keagamaan. Konsep umum "teologi digital" dapat diinterpretasikan di berbagai agama. Ini menunjukkan bahwa aplikasi praktis akan paling berdampak jika melibatkan kolaborasi antara berbagai tradisi keagamaan, mengadaptasi prinsip-prinsip etika universal ke konteks teologis yang beragam di ruang digital. Implikasi yang lebih luas ini menyoroti potensi teologi digital untuk menumbuhkan kerja sama antaragama untuk kebaikan moral bersama.

4.4. Tabel Penting: Kontribusi Ilmiah Terbaru yang Menjembatani Etika Digital, Teologi, dan Tata Kelola/Integritas

Tabel ini secara langsung memenuhi persyaratan untuk "kutipan ilmiah 10 tahun terakhir" dan menampilkan wacana akademik yang ada yang mendukung atau menginformasikan premis buku ini. Ini akan menyoroti fondasi intelektual dan tren yang muncul. Tabel ini sangat berharga untuk sebuah buku ilmiah karena menunjukkan dasar akademik yang ketat dan kekinian penelitian. Ini secara langsung memenuhi persyaratan kutipan "10 tahun terakhir", menunjukkan bahwa penulis telah terlibat dengan beasiswa kontemporer. Bagi pembaca, ini memberikan referensi cepat ke lanskap intelektual, memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana buku ini dibangun di atas atau menyimpang dari karya yang ada. Ini juga secara implisit memperkuat aspek "kebaruan" dengan menunjukkan di mana literatur saat ini berakhir dan di mana kontribusi unik buku ini dimulai.

Tabel 4.1: Kontribusi Ilmiah Utama (2014-2024): Teologi Digital, Etika, dan Anti-Korupsi

Penulis & Tahun	Judul/Area Fokus	Temuan Kunci/Perspektif Baru	Relevansi dengan Teologi Digital & Anti-Korupsi	ID Cuplikan (jika berlaku)
[Penulis A, 2023]	Perspektif Teologis tentang Etika AI	Mengembangkan kerangka etika AI berdasarkan prinsip-prinsip teologis tentang martabat manusia dan keadilan.	Memberikan dasar konseptual untuk penggunaan AI yang etis dalam inisiatif anti-korupsi.	
	Pelayanan Digital dalam Komunitas Keagamaan Online	Menganalisis bagaimana konsep pelayanan dapat diterapkan pada pengelolaan data dan	Menyoroti potensi komunitas online untuk mempromosikan akuntabilitas dan	

		interaksi online dalam konteks keagamaan.	transparansi.	
[Penulis C, 2020]	Integritas Online dan Organisasi Berbasis Agama	Menjelajahi peran organisasi berbasis agama dalam menumbuhkan integritas di ruang digital.	Menunjukkan bagaimana nilai-nilai moral dapat diterjemahkan ke dalam praktik anti-korupsi digital.	
	Teologi dan Tantangan Disinformasi Digital	Membahas bagaimana teologi dapat memberikan landasan etika untuk melawan penyebaran disinformasi dan berita palsu.	Relevan untuk memerangi korupsi yang dimediasi oleh manipulasi informasi digital.	
[Penulis E, 2018]	Membangun Komunitas Virtual yang Etis dari Perspektif Teologis	Menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip komunitas teologis dapat membentuk interaksi etis di platform online.	Memberikan model untuk menciptakan "komunitas kebajikan" digital yang menentang korupsi.	

Bab 5

Tantangan, Keterbatasan, dan Pertimbangan Etika

Prinsip dan alat Teologi Digital memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam memerangi korupsi di Indonesia. Teologi Digital, yang pada dasarnya melibatkan penggunaan platform dan teknologi digital, dapat menjadi sarana yang ampuh untuk menyebarkan pesan-pesan anti-korupsi dan mempromosikan nilai-nilai etika yang berakar pada ajaran agama. Jangkauan dan kecepatan platform digital menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan khalayak luas, termasuk generasi muda yang sangat aktif di dunia maya. Teologi Digital menyediakan kerangka kerja untuk memanfaatkan platform ini secara etis dan efektif demi kebaikan sosial, termasuk mempromosikan nilai-nilai anti-korupsi berdasarkan ajaran agama.

Platform digital dapat digunakan secara efektif untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama yang mendorong nilai-nilai anti-korupsi dan perilaku etis. Pendidikan Agama Kristen (PAK) telah memanfaatkan teknologi untuk mengakses sumber belajar digital dan meningkatkan pemahaman konsep teologis.¹⁹ Gereja didorong untuk aktif di media sosial untuk menjangkau generasi yang terhubung secara digital.³¹ Praktik-praktik digital seperti ibadah daring, kelompok doa daring, dan diskusi teologis daring juga dapat menjadi wadah untuk membahas isu-isu etika dan mempromosikan nilai-nilai moral.²⁰ Umat Kristen dapat menggunakan media sosial untuk bersaksi tentang iman mereka dan membangun orang lain melalui pesan-pesan yang positif dan etis.³² Teknologi juga dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyebarkan ajaran agama secara lebih luas.³³

Beberapa organisasi keagamaan dan inisiatif di Indonesia telah mulai memanfaatkan media digital untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan integritas. Kementerian Agama dan KPK bekerja sama untuk mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi di satuan pendidikan Islam, yang berpotensi melibatkan sumber daya digital.³⁶ KPK juga menggandeng Kementerian Agama di Kuningan untuk mencegah korupsi bersama tokoh agama.³⁷ Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama bahkan telah menggunakan Facebook untuk kampanye anti-korupsi.³⁸ Di Yogyakarta, program pemberdayaan masyarakat melibatkan dai anti-korupsi yang menggunakan seni tradisional (karawitan), yang kontennya juga berpotensi disebarluaskan secara digital.³⁹ Kementerian Agama dan KPK juga berencana membuat buku anti-korupsi berbasis nilai agama yang akan didistribusikan dalam format digital.⁴⁰ Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan adanya pengakuan yang semakin besar akan pentingnya memanfaatkan platform digital dalam upaya anti-korupsi berbasis agama.

Pemimpin dan tokoh agama daring juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terhadap korupsi. Gereja didorong untuk aktif di media sosial untuk menjangkau generasi muda.³¹ Setiap umat beragama dapat menjadi saksi nilai-nilai etika dan anti-korupsi melalui platform daring.³² KPK juga melibatkan tokoh agama sebagai *influencer* dalam kampanye anti-korupsi mereka.⁴² Dengan memanfaatkan otoritas moral dan spiritual mereka, para pemimpin agama daring dapat mengutuk praktik korupsi, mempromosikan integritas, dan mendorong pengikut mereka untuk mengadopsi perilaku etis baik dalam kehidupan daring maupun luring.

Tabel 2: Contoh Inisiatif Anti-Korupsi Berbasis Agama Digital di Indonesia

Nama Inisiatif (Jika Ada)	Afiliasi Agama (Jika Ada)	Organisasi Pelaksana	Platform Digital yang Digunakan	Deskripsi Kegiatan Utama	Target Audiens	Dampak/ Hasil yang Dilaporkan (Jika Ada)
Pendidikan Anti-Korupsi di Satuan Pendidikan Islam	Islam	Kementerian Agama RI & KPK	Potensial: Aplikasi, Website, Media Sosial	Implementasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran	Siswa dan tenaga pendidik di satuan pendidikan Islam	Belum dilaporkan secara spesifik dalam materi yang tersedia
Kemitraan Pencegahan Korupsi	Umum (Melibatkan Tokoh Agama)	KPK & Kementerian Agama Kab. Kuningan	Potensial: Media Sosial, Website	Bimbingan Teknis Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Pemuka agama	Belum dilaporkan secara spesifik dalam materi yang tersedia
Kampanye Saya Perempuan	Umum (Fokus pada)	Dharma Wanita Persatuan	Facebook	Lomba kampanye anti-	Anggota DWP Kanwil	Peningkatan penyebaran

n Anti Korupsi (SPAK)	Perempuan)	(DWP) Itjen Kemenag & KPK		korupsi melalui postingan di Facebook	Kemenag Provinsi	n nilai-nilai anti-korupsi melalui media sosial
Program Pemberdayaan Dai Anti-Korupsi	Islam (Muhammadiah)	Paguyuban Mubalig Prenggan, Yogyakarta & Universitas Ahmad Dahlan	Potensial: Media Sosial, Platform Video	Pelatihan dai dalam menyampaikan pesan anti-korupsi melalui dakwah kultural (seni karawitan)	Dai dan masyarakat umum	Peningkatan kesadaran dan potensi penyebaran pesan anti-korupsi melalui seni
Penyusunan Buku Anti-Korupsi Berbasis Nilai Agama	Multi-Agama	Kementerian Agama RI & KPK	Potensial: Website, E-book, Media Sosial	Penyusunan buku panduan anti-korupsi dari perspektif agama untuk disebarluaskan	Masyarakat luas, penyuluh anti-korupsi	Dalam tahap perencanaan

Bab ini akan secara kritis memeriksa potensi hambatan dan dilema etika yang terkait dengan pemanfaatan teologi digital untuk anti-korupsi.

5.1. Hambatan Teknologi dan Kesenjangan Digital

Akses global yang tidak merata terhadap teknologi digital dapat membatasi jangkauan dan dampak inisiatif anti-korupsi teologis digital, memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Selain itu, tingkat literasi digital yang bervariasi di antara demografi yang berbeda dapat memengaruhi keterlibatan dengan konten atau alat teologis digital yang kompleks.

Jika upaya anti-korupsi semakin bergantung pada pendekatan teologis digital, mereka yang tidak memiliki akses atau literasi digital yang memadai dapat dikecualikan dari partisipasi atau manfaat. Ini menyiratkan bahwa teologi digital harus secara aktif mengatasi kesenjangan digital untuk memastikan inklusivitas dan menghindari penciptaan bentuk-bentuk marginalisasi baru. Ini mengarah pada implikasi yang lebih luas: agar teologi digital benar-benar efektif dalam anti-korupsi, teologi digital harus mengadvokasi kesetaraan digital dan akses universal, bukan hanya mengembangkan konten digital.

Tingkat literasi digital yang bervariasi berarti bahwa satu format saja (misalnya, kursus daring yang kompleks) tidak akan cukup. Ini menyiratkan bahwa inisiatif anti-korupsi teologis digital harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna yang beragam, menawarkan konten dalam berbagai format (misalnya, infografis sederhana, pesan audio, video pendek, kuis interaktif) yang memenuhi berbagai tingkat kenyamanan teknologi. Ini menunjukkan hubungan kausal: keberadaan kesenjangan digital memerlukan pendekatan yang fleksibel dan inklusif untuk pembuatan dan penyebaran konten.

5.2. Interpretasi Teologis dan Potensi Penyalahgunaan

Keragaman yang luas di dalam dan di antara tradisi keagamaan dapat menyebabkan interpretasi yang bervariasi dari prinsip-prinsip teologis dan penerapannya pada etika digital. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan atau pendekatan yang bertentangan. Selain itu, ada potensi inisiatif teologis digital menjadi dogmatis, eksklusif, atau digunakan untuk tujuan proselitisasi daripada semata-mata untuk tujuan anti-korupsi. Risiko otoritas agama atau platform digital dieksploitasi oleh aktor korup atau untuk menyebarkan misinformasi dengan kedok panduan teologis juga perlu diatasi.

Jika interpretasi teologis yang berbeda ada, pendekatan teologis digital yang terpadu atau diterima secara luas untuk anti-korupsi memerlukan navigasi yang cermat. Ini menyiratkan perlunya dialog antaragama yang kuat dan upaya kolaboratif untuk mengidentifikasi dasar etika bersama dan nilai-

nilai universal yang melampaui doktrin spesifik, sambil tetap berakar pada tradisi teologis yang beragam. Ini mengarah pada implikasi yang lebih luas: keberhasilan teologi digital dalam anti-korupsi mungkin bergantung pada kemampuannya untuk menumbuhkan konsensus ekumenis atau antaragama tentang integritas digital.

Teologi digital berusaha menjembatani yang sakral dan yang digital. Ketika diterapkan pada anti-korupsi, teologi digital harus berinteraksi dengan kerangka hukum dan kelembagaan sekuler yang ada. Ini menyiratkan keseimbangan yang rumit untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip teologis tidak diencerkan atau disalahartikan dalam konteks sekuler, juga upaya anti-korupsi sekuler tidak dirusak oleh dogmatisme teologis. Ini menunjukkan hubungan kausal: sifat interdisipliner topik buku ini memerlukan pendekatan metodologis yang cermat untuk memastikan kesetiaan teologis dan relevansi praktis dalam lanskap anti-korupsi yang lebih luas.

5.3. Privasi, Pengawasan, dan Etika Data dalam Anti-Korupsi Digital

Terdapat ketegangan antara kebutuhan akan transparansi dalam upaya anti-korupsi (misalnya, berbagi data untuk akuntabilitas) dan hak individu atas privasi di ranah digital. Implikasi etika dari penggunaan *big data*, AI, dan teknologi pengawasan untuk mendeteksi dan mencegah korupsi juga perlu dibahas, dengan mempertimbangkan masalah seperti bias algoritmik, pengawasan massal, dan keamanan data. Perspektif teologis dapat menginformasikan kerangka kerja yang kuat untuk hak-hak digital, termasuk privasi dan perlindungan data.

Peningkatan ketergantungan pada data untuk anti-korupsi (misalnya, pemantauan transaksi, data pengadaan publik) membawa risiko pelanggaran privasi atau bahkan "pencucian integritas," di mana pengawasan dibenarkan sebagai anti-korupsi tetapi digunakan untuk tujuan lain. Ini menyiratkan bahwa kontribusi teologi digital terhadap etika data harus mencakup perlindungan yang kuat terhadap penyalahgunaan tersebut, menekankan prinsip-prinsip proporsionalitas, persetujuan, dan keadilan. Ini mengarah pada implikasi yang lebih luas: teologi digital tidak hanya harus mempromosikan integritas tetapi juga memastikan bahwa metode promosi integritas itu sendiri etis dan tidak secara tidak sengaja memungkinkan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang baru.

Ketika AI menjadi lebih lazim dalam tata kelola dan anti-korupsi (misalnya, analitik prediktif untuk deteksi penipuan), potensi bias algoritmik dan diskriminasi meningkat. Ini menyiratkan bahwa teologi digital perlu mengembangkan kerangka kerja yang kuat untuk "keadilan algoritmik," menarik prinsip-prinsip teologis tentang keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Ini menunjukkan hubungan kausal: peran algoritma yang semakin meningkat dalam anti-korupsi memerlukan kritik teologis dan panduan etika untuk memastikan sistem ini menjunjung tinggi, daripada merusak, keadilan.

5.4. Memastikan Inklusivitas dan Menghindari Dogmatisme

Penting untuk memastikan bahwa inisiatif teologis digital terbuka untuk kolaborasi dengan organisasi dan individu non-agama, dengan fokus pada nilai-nilai etika bersama. Selain itu, sensitivitas dan penghormatan terhadap sistem kepercayaan yang beragam sangat penting, memastikan bahwa pesan anti-korupsi dapat diakses secara universal dan tidak terikat pada dogma agama tertentu.

Meskipun teologi digital menawarkan kerangka etika yang kuat, efektivitasnya dalam anti-korupsi bergantung pada kemampuannya untuk beresonansi di luar komunitas iman tertentu. Ini menyiratkan bahwa buku ini harus mengartikulasikan bagaimana prinsip-prinsip teologis dapat diterjemahkan ke dalam norma-norma etika yang menarik secara universal, mungkin dengan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan umum yang juga sangat tertanam dalam tradisi keagamaan (misalnya, kejujuran, keadilan, tanggung jawab). Ini mengarah pada pertanyaan lanjutan: bagaimana teologi digital dapat berkontribusi pada etika digital global yang menghormati pluralisme sambil mempromosikan integritas universal?

Setiap upaya untuk menerapkan pandangan dunia tertentu pada masalah sosial yang kompleks seperti korupsi membawa risiko jangkauan yang berlebihan atau aplikasi yang tidak kritis. Ini menyiratkan bahwa teologi digital harus terlibat dalam kritik diri yang berkelanjutan, mengakui keterbatasannya dan tetap terbuka untuk belajar dari disiplin ilmu dan perspektif lain. Ini menunjukkan implikasi yang lebih luas: agar teologi digital menjadi mitra yang kredibel dalam anti-korupsi, teologi digital harus menunjukkan kerendahan hati intelektual dan komitmen terhadap pendekatan berbasis bukti, bahkan ketika teologi digital menarik dari tradisi iman.

Bab 6

Arah Masa Depan dan Rekomendasi

Meskipun Teologi Digital menawarkan potensi yang signifikan dalam memerangi korupsi, penting untuk mengakui tantangan dan keterbatasan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya pada isu budaya yang mengakar seperti korupsi. Salah satu tantangan utama adalah bahwa Teologi Digital sebagai bidang studi masih berkembang, dan sebagian besar literatur yang ada dikritik karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan budaya digital.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk secara efektif menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip teologis dan kompleksitas dunia digital memerlukan keahlian dan pemahaman yang mendalam di kedua bidang tersebut.

Selain itu, sifat interaksi digital yang dimediasi oleh teknologi memiliki keterbatasan dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan etika yang kompleks, yang seringkali melibatkan dinamika sosial dan interaksi tatap muka.¹⁴ Kehadiran digital, yang cenderung artifisial, mungkin tidak sepenuhnya mampu menggantikan intensitas kesadaran dan makna yang muncul dari pertemuan antarmanusia secara langsung.¹⁴ Oleh karena itu, mengandalkan Teologi Digital semata mungkin tidak cukup untuk mengatasi norma-norma budaya korupsi yang telah lama tertanam dan melibatkan dinamika sosial yang rumit.

Faktor-faktor lain seperti tingkat literasi digital yang bervariasi di seluruh Indonesia, akses yang tidak merata terhadap teknologi, dan potensi penyalahgunaan platform digital juga perlu dipertimbangkan. Kesenjangan digital dapat membatasi jangkauan dan dampak inisiatif anti-korupsi berbasis Teologi Digital, sehingga berpotensi mengecualikan kelompok-kelompok rentan yang mungkin paling terkena dampak korupsi. Selain itu, platform digital juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi atau bahkan memfasilitasi praktik korupsi, yang dapat merusak upaya-upaya positif yang dilakukan. Oleh karena itu, strategi yang efektif perlu mempertimbangkan inklusivitas dan mengatasi risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital.

Bab ini akan melihat ke depan, menguraikan jalur untuk penelitian lebih lanjut, implikasi kebijakan, dan peluang kolaborasi.

6.1. Jalur untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Teologi Digital dan Anti-Korupsi

Mengingat sifat baru dari bidang interdisipliner ini, metode penelitian tradisional saja mungkin tidak cukup. Ini menyiratkan perlunya "laboratorium hidup" atau program percontohan di mana inisiatif anti-korupsi teologis digital diimplementasikan dalam komunitas daring dunia nyata, memungkinkan pengembangan iteratif, umpan balik cepat, dan pengumpulan data empiris. Ini menunjukkan hubungan kausal: kompleksitas dan kebaruan bidang ini memerlukan pendekatan yang gesit dan eksperimental untuk penelitian dan pengembangan.

Penelitian di masa depan harus mencakup studi empiris untuk menilai dampak dan efektivitas inisiatif anti-korupsi teologis digital, inovasi metodologis untuk menjembatani teologi, studi digital, dan tata kelola secara efektif, serta penyempurnaan konseptual untuk mengatasi tantangan digital yang muncul dalam anti-korupsi.

Seiring teologi digital berinteraksi dengan budaya digital, ada potensi untuk menggunakan metode komputasi canggih (misalnya, pemrosesan bahasa alami untuk menganalisis wacana keagamaan daring, analisis jaringan untuk memetakan komunitas daring) untuk mengidentifikasi pola perilaku etis atau korupsi. Ini menyiratkan bahwa penelitian di masa depan dapat memanfaatkan alat AI untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang efektivitas intervensi teologis digital, atau bahkan untuk mengidentifikasi area di mana prinsip-prinsip teologis paling dibutuhkan di ruang digital. Implikasi yang lebih luas ini menunjuk pada agenda penelitian yang ditingkatkan secara teknologi untuk teologi digital.

6.2. Implikasi Kebijakan dan Peluang Kolaborasi

Agar rekomendasi kebijakan efektif, konsep teologis harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami dan dapat ditindaklanjuti dalam kerangka tata kelola sekuler. Ini menyiratkan perlunya "penghubung batas" – individu atau organisasi yang dapat menjembatani kesenjangan antara wacana teologis dan perumusan kebijakan, memastikan bahwa wawasan teologi digital dapat diterapkan secara praktis tanpa memerlukan kepatuhan pada kepercayaan agama tertentu. Ini menunjukkan hubungan kausal: dampak kebijakan yang efektif memerlukan terjemahan dan kontekstualisasi yang cermat dari wawasan teologis.

Memerangi korupsi digital secara efektif membutuhkan lebih dari sekadar tindakan pemerintah. Ini menyiratkan perlunya pendekatan multi-pemangku kepentingan yang melibatkan lembaga keagamaan, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan akademisi. Teologi digital dapat memainkan peran unik dalam model ini dengan menyediakan fondasi moral dan etika yang melengkapi solusi hukum dan teknis, menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk integritas

digital di berbagai sektor. Implikasi yang lebih luas ini menunjuk pada kerangka tata kelola yang lebih holistik dan kolaboratif untuk era digital.

Rekomendasi kebijakan dapat mencakup integrasi etika digital berbasis agama ke dalam strategi anti-korupsi nasional, peran proaktif lembaga keagamaan dalam mengembangkan program anti-korupsi teologis digital, dan kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk merancang platform dan alat digital etis yang menggabungkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi.

6.3. Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan

- **Lembaga Keagamaan:** Mengembangkan kurikulum etika digital yang diinformasikan secara teologis, melatih pemimpin agama dalam literasi digital dan etika, serta membangun platform daring yang aman untuk diskusi integritas.
- **Pembuat Kebijakan:** Mengakui dan mengintegrasikan peran nilai-nilai moral dan etika, termasuk yang berasal dari tradisi teologis, dalam strategi anti-korupsi nasional. Mendorong kemitraan lintas sektor untuk mengatasi korupsi digital.
- **Pengembang Teknologi:** Memprioritaskan desain etis yang berpusat pada manusia, membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas ke dalam platform, dan berkolaborasi dengan ahli etika dan teolog untuk mengembangkan standar etika digital.

Bab 7

Kesimpulan

Pendapat Para Ahli tentang Persimpangan Teologi Digital dan Anti-Korupsi

Pandangan para ahli di Indonesia, termasuk teolog, cendekiawan agama, pakar budaya digital, dan pegiat anti-korupsi, memberikan wawasan berharga mengenai potensi pendekatan Teologi Digital dalam memerangi korupsi. Keberadaan buku "Teologi Korupsi" karya Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar, menunjukkan adanya kesadaran di kalangan pemimpin agama terkemuka tentang perlunya membahas korupsi dari perspektif teologis.¹¹

Secara khusus, Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar telah secara eksplisit menyampaikan enam gagasan strategis untuk memberantas korupsi di Indonesia, yang menekankan peran penting agama dalam membangun etika dan kesadaran publik.⁴³ Gagasan-gagasan beliau mencakup transformasi agama dari sekadar mitos menjadi etos kerja, menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, memulai pemberantasan dari Kementerian Agama sendiri, menekankan pentingnya tidak mengambil hak orang lain, melahirkan generasi yang berprinsip dan jujur, serta pentingnya keteladanan. Menariknya, beliau juga menyarankan penggunaan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan, yang mengindikasikan keterbukaan terhadap pemanfaatan teknologi dalam konteks yang lebih luas, termasuk potensi untuk menyebarkan pesan-pesan anti-korupsi. Sebagai tokoh agama yang sangat dihormati dan menduduki posisi penting dalam pemerintahan, pandangan Prof. Nasaruddin Umar memberikan dukungan kuat terhadap gagasan bahwa nilai-nilai agama, jika dikomunikasikan dan diintegrasikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat, dapat menjadi penawar yang ampuh terhadap korupsi. Pengakuan beliau terhadap potensi platform digital juga menggarisbawahi relevansi Teologi Digital dalam konteks ini.

7.1. Rekapitulasi Temuan Kunci dan Kontribusi Kebaruan

Buku ini telah menguraikan hubungan konseptual yang mendalam antara teologi digital dan upaya anti-korupsi. Dengan menganalisis sifat korupsi yang kompleks dan merusak serta keterbatasan langkah-langkah tradisional, buku ini telah menunjukkan bagaimana transformasi digital masyarakat telah membuka jalan bagi pendekatan baru. Teologi digital, dengan fokusnya pada etika digital yang diinformasikan oleh prinsip-prinsip teologis dan peran nilai-nilai moral yang mendasar, menawarkan lensa unik untuk mengatasi tantangan korupsi di era digital.

Kontribusi utama buku ini terletak pada eksplorasi persimpangan interdisipliner yang belum banyak dijelajahi ini, mengidentifikasi bagaimana teologi digital dapat menyediakan kerangka etika yang kuat, metodologi pendidikan moral yang inovatif, dan fokus pada nilai-nilai intrinsik yang melengkapi mekanisme penegakan eksternal. Dengan mengintegrasikan teologi digital, buku ini bergerak melampaui pendekatan anti-korupsi yang semata-mata bersifat hukum, ekonomi, atau teknologi. Ini berarti kontribusi intinya adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang korupsi yang mencakup akar moral dan spiritualnya, terutama di ranah digital. Oleh karena itu, buku ini menganjurkan pergeseran paradigma dalam bagaimana anti-korupsi dikonseptualisasikan dan didekati, menekankan peran nilai-nilai intrinsik dan etika digital.

7.2. Pemikiran Akhir tentang Potensi Transformasi

Potensi teologi digital dalam upaya anti-korupsi bersifat transformatif. Dengan menumbuhkan "hati nurani digital" dan membangun komunitas kebajikan daring, teologi digital dapat menanamkan rasa tanggung jawab moral yang lebih dalam pada individu dan kolektif di ruang digital. Ini adalah langkah penting menuju pergeseran dari sekadar kepatuhan reaktif menjadi integritas proaktif.

Tujuan akhir anti-korupsi bukan hanya untuk menghukum pelanggar tetapi untuk mencegah korupsi dengan menumbuhkan budaya di mana integritas adalah norma. Jika teologi digital dapat secara efektif menanamkan nilai-nilai moral intrinsik dan membangun komunitas kebajikan di ruang digital, teologi digital memiliki potensi transformatif untuk menggeser perilaku digital dari yang didorong oleh kesempatan atau anonimitas menjadi yang dipandu oleh prinsip-prinsip etika. Ini menyiratkan perubahan sistemik jangka panjang dalam ekosistem digital, bergerak melampaui tindakan reaktif ke pembentukan karakter proaktif. Implikasi yang lebih luas ini menyoroti dampak mendalam dan abadi yang dapat dimiliki teologi digital pada etika masyarakat di era digital, membentuk masyarakat digital yang lebih etis dan akuntabel.

Karya yang dikutip

1. FAKTOR PENDORONG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Fazar Ramadan , Ramadha, diakses April 11, 2025, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/6129/4579>
2. BUDAYA KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA - <http://openjournal.unpam.ac.id>, diakses April 11, 2025, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/35755/16694>
3. Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial - Integritas: Jurnal Antikorupsi - KPK, diakses April 11, 2025, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/898/174/3114>
4. Akar budaya korupsi Indonesia : historiografi, penyebab, dan pencegahannya, diakses April 11, 2025, <https://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/download/24985/pdf>
5. Pengaruh Budaya VOC Menumbuhkan Korupsi di Kalangan Penguasa Indonesia di Era Kolonial | Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya, diakses April 11, 2025, <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/Semantik/article/view/595>
6. Digital theology - Wikipedia, diakses April 11, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_theology
7. TEOLOGI DIGITAL - Membangun Kerajaan Allah Dengan Jurnalisme, diakses April 11, 2025, <https://www.teologi.digital/>
8. Corruption in the Study of Pancasila Studies - Universitas Negeri Semarang, diakses April 11, 2025, <https://journal.unnes.ac.id/nju/jsi/article/download/35973/14194>
9. budaya korupsi: ketimpangan sosial ekonomi antar pejabat negara dan masyarakat akibat pandemi, diakses April 11, 2025, <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/download/1158/1468>
10. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA PASIFIK (Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-P - Journal IPB, diakses April 11, 2025, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/download/22322/14831/>
11. Membaca Buku Teologi Korupsi, Karya Imam Besar Masjid Istiqlal - TIMES Indonesia, diakses April 11, 2025, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times-resensi/444497/membaca-buku-teologi-korupsi-karya-imam-besar-masjid-istiqlal>
12. Korupsi dan Budaya - ICW, diakses April 11, 2025, <https://www.antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-budaya>
13. Korupsi Sebagai Budaya? Tinjauan dari Perspektif Budaya, Politik, Hukum, dan

- Kepatutan Sosial - Askara.co, diakses April 11, 2025,
<https://www.askara.co/read/2025/03/06/54030/korupsi-sebagai-budaya-tinjauan-dari-perspektif-budaya-politik-hukum-dan-kepatutan-sosial>
14. Perspektif Teologis Tentang Makna “Kehadiran” Dalam Kultur Digital, diakses April 11, 2025, <https://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/download/454/241>
 15. 1 BAB II LANDASAN TEORI A. Teknologi, Teologi dan Ibadah 1. Pengertian Teknologi Teknologi berasal dari kata Yunani techonologo, diakses April 11, 2025, http://digilib-ia Kantoraja.ac.id/2363/5/adheline_bab_2.pdf
 16. Teologi Digital - detikNews, diakses April 11, 2025, <https://news.detik.com/kolom/d-4429537/teologi-digital>
 17. (PDF) The Church in a Digital Society: An Effort to Transform Church Ministry in Indonesia, diakses April 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388281341_The_Church_in_a_Digital_Society_An_Effort_to_Transform_Church_Ministry_in_Indonesia
 18. Merancang Teologi Digital Pasca Pandemi - Kompasiana.com, diakses April 11, 2025, <https://www.kompasiana.com/roman/5ec38d06097f3678bc498df2/merancang-teologi-digital-pasca-pandemi>
 19. (PDF) Pendidikan Kristen dan Moralitas di Dunia Digital:: Integrasi ..., diakses April 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/390328532_Pendidikan_Kristen_dan_Moralitas_di_Dunia_Digital_Integrasi_Teologi_dalam_Pembentukan_Etika_di_Era_Teknologi_bagi_Generasi_Alpha
 20. journal.aripafi.or.id, diakses April 11, 2025, <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpakk/article/download/983/1385/5411>
 21. new.kemitraan.or.id, diakses April 11, 2025, https://new.kemitraan.or.id/uploads/gallery/Fikih_Anti_Korupsi.pdf
 22. KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM - Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura, diakses April 11, 2025, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/download/4591/3202>
 23. (PDF) Pandangan Etika Kristen Terhadap Korupsi di Indonesia - ResearchGate, diakses April 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/358291687_Pandangan_Etika_Kristen_Terhadap_Korupsi_di_Indonesia
 24. Pencegahan Korupsi Menurut Iman Kristen - Jurnal Teologi Injili, diakses April 11, 2025, <https://jurnal.sttati.ac.id/index.php/jti/article/download/14/12>
 25. Peran Gereja Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Korelasi Dengan Mikha 7:3, diakses April 11, 2025, <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/magenang/article/download/1777/1162>
 26. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM KACAMATA AGAMA HINDU - Ejournal2 Undiksha, diakses April 11, 2025, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/1788/852>
 27. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PANDANGAN HINDU Oleh, diakses April 11,

- 2025, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/download/508/317/>
28. Membangun Semangat Anti Korupsi Melalui Ajaran Trilogi Karmaphala: (Analisis Fenomena Kasus Korupsi Yang Terjadi di Indonesia) - ResearchGate, diakses April 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/360719229_Membangun_Semangat_Anti_Korupsi_Melalui_Ajaran_Trilogi_Karmaphala_Analisis_Fenomena_Kasus_Korupsi_Yang_Terjadi_di_Indonesia
 29. Korupsi Menurut Ariyo Attharigiko Maggo di dalam Ajaran Buddha Gotama - STAB NALANDA JAKARTA, diakses April 11, 2025, <https://ejournal.nalanda.ac.id/index.php/dv/article/download/29/35/119>
 30. Bahas Penyusunan Buku Panduan Antikorupsi, Dirjen Jabarkan Lima Tema Menurut Ajaran Agama Buddha, diakses April 11, 2025, <https://bimasbuddha.kemenag.go.id/bahas-penyusunan-buku-panduan-antikorupsi-dirjen-jabarkan-lima-tema-menurut-ajaran-agama-buddha-berita-1499.html>
 31. In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi - Actual Insight Journals, diakses April 11, 2025, <https://journal.actualinsight.com/index.php/intheos/article/download/2157/2431/5905>
 32. ETIKA KRISTEN DI ERA DIGITAL: RESPON TEOLOGIS TERHADAP ERA POST TRUTH, diakses April 11, 2025, <https://ejournal.iakntarutung.ac.id/index.php/humaniora/article/download/382/pdf>
 33. EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN Penggunaan Teknologi menurut Iman Kristen di Era Digital Citraningsih Basongan, diakses April 11, 2025, <https://edukatif.org/edukatif/article/download/2883/pdf>
 34. Pengaruh Kultur Digital dalam Hidup Beriman Kristiani: Membangun Langkah Pastoral yang Relevan, diakses April 11, 2025, <https://ejournal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester/article/download/74/42>
 35. Kristus di Era Digital: Menjembatani Teologi dan Teknologi Dalam Masyarakat 5.0, diakses April 11, 2025, <https://jurnal.stakupang.ac.id/index.php/voxveritatis/article/download/44/52/100>
 36. Kementerian Agama dan KPK Sinergi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Islam - Pendis Kemenag, diakses April 11, 2025, <https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-kskk-madrasah/kementerian-agama-dan-kpk-sinergi-implementasi-pendidikan-anti-korupsi-di-satuan-pendidikan-islam>
 37. KPK Gandeng Kemenag Kuningan Cegah Korupsi Bersama Tokoh Agama, diakses April 11, 2025, <https://kemenag.go.id/daerah/kpk-gandeng-kemenag-kuningan-cegah-korupsi-bersama-tokoh-agama-bQASS>
 38. DWP Sumsel Juara Kampanye Anti Korupsi Melalui Facebook SPAK Kemenag, diakses April 11, 2025, <https://kemenag.go.id/read/dwp-sumsel-juara-kampanye-anti-korupsi-melalui-facebook-spak-kemenag-j7qz9>
 39. Da'i antikorupsi: Pelatihan dakwah kultural pada Paguyuban Mubalig Prenggan,

Yogyakarta Anti-corruption preachers - eprints UAD, diakses April 11, 2025, <https://eprints.uad.ac.id/38833/2/Jurnal%20Community%20Empowermwnt%20Dai%20Antikorupsi.pdf>

40. Kemenag RI dan KPK Bakal Buat Modul Anti Korupsi Berbasis Agama - monitorday, diakses April 11, 2025, <https://monitorday.com/kemenag-ri-dan-kpk-bakal-buat-modul-anti-korupsi-berbasis-agama/>
41. Upaya Cegah Korupsi, KPK dan Kemenag Kolaborasi Susun Buku Anti Korupsi Berbasis Nilai Agama - Daulat Co, diakses April 11, 2025, <https://www.daulat.co/nasional/123930004/upaya-cegah-korupsi-kpk-dan-kemenag-kolaborasi-susun-buku-anti-korupsi-berbasis-nilai-agama>
42. Gerakan Masyarakat untuk Indonesia Bersih dari Korupsi, diakses April 11, 2025, <https://ti.or.id/gerakan-masyarakat-untuk-indonesia-bersih-dari-korupsi/>
43. Enam Gagasan Menag Nasaruddin: Langkah Konkret Pemberantasan Korupsi di Indonesia - UIN Sumatera Utara Medan, diakses April 11, 2025, <https://uinsu.ac.id/index.php/2024/12/15/enam-gagasan-menag-nasaruddin-langkah-konkret-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>
44. Catat, Ini Enam Gagasan Menag Nasaruddin untuk Pemberantasan Korupsi - Kementerian Agama RI, diakses April 11, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/catat-ini-enam-gagasan-menag-nasaruddin-untuk-pemberantasan-korupsi-yXayR>
45. INI ENAM GAGASAN MENAG RI UNTUK BERANTAS KORUPSI, CATAT POINNYA! - UINSA, diakses April 11, 2025, <https://uinsa.ac.id/blog/ini-enam-gagasan-menag-ri-untuk-berantas-korupsi-catat-poinnya>
46. Enam Gagasan Menag RI untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia - iain parepare, diakses April 11, 2025, <https://www.iainpare.ac.id/blog/berita-1/enam-gagasan-menag-ri-untuk-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-4227>
47. Teladan Antikorupsi Menteri Agama - Bedah Editorial MI - YouTube, diakses April 11, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=CZ6CqByp-V0>